75

BUTIR-BUTIR BAHAN PEMIKIRAN DAN SARAN KELANJUTAN 12 PERSEMAIAN MODERN DI INDONESIA

Dudung Darusman

Disampaikan pada saat Rapat dengan Direktur Reboisasi Dirjen RLPS, di Jakarta tanggal 9 April 1999

I. EVALUASI KEBIJAKSANAAN PEMBUATAN PERSEMAIAN MODERN

1. Kebutuhan bibit tanaman adalah turunan permintaan dari realisasi (pasar) penanaman : HTI, perkebunan, reboisasi dan rehabilitasi lahan, hutan kemasyarakatan dan lain-lain. Tampaknya kebijaksanaan pembangunan 12 persemaian modern lebih melihat atau berdasarkan potensi (lahan-lahan calon penanaman) daripada perkiraan realisasinya.

2. Persemaian dapat dijadikan usaha terpisah dari penanaman apabila ada mekanisme pasar dari bibit, baik secara bebas maupun secara kontrak. Bila tidak, bibit akan harus dibuat sendiri oleh penanam.

3. Biaya HTI, baik dari segi perhitungan, penyaluran kredit maupun pengawasannya adalah berupa paket dan secara formal tidak dapat dipisah-pisahkan menurut biaya dari unsur-unsur kegiatannya, sehingga persemaian sulit dipisahkan.

4. Porsi biaya persemaian (pengadaan bibit) tidaklah terlalu besar, ditaksir hanya 6 - 10 % saja dari keseluruhan biaya penanaman, sedangkan ketersediaan bibit merupakan faktor yang sangat kritikal. Oleh karena itu untuk perusahaan penanaman menjadi lebih rasional membuat bibit sendiri.

5. Ada kekeliruan mendasar pada tahap perencanaan (*feasibility study*) yakni dalam penentuan skala unit usaha/produksi yang di-*set* terlalu besar dan skala operasi penuh ternyata lebih kecil atau sama dengan skala *break even*, yang terbukti dari adanya angka-angka kenaikan biaya total yang langsung meningkat begitu kapasitas operasi berkurang (Dokumen rencana pemasaran bibit yang dibuat konsultan *Enso Forest Development Oy, Lt, Bag I Bab 2.2 Biaya Bibit*).

   Pendekatan analisis seperti dimaksud di atas adalah keliru apabila diharapkan unit persemaian menjadi mandiri. Seharusnya pilihan kapasitas produksi berada di sekitar perkiraan permintaan terendah, atau dengan kata lain *Break Even Point* (BEP) kira-kira sama dengan permintaan terendah.

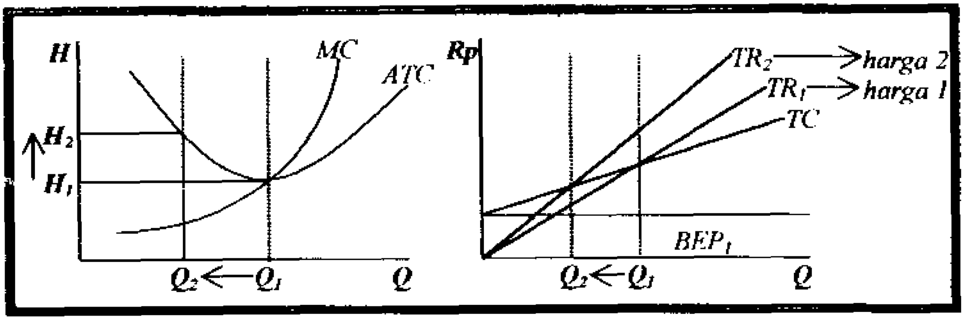

6. Betapa kelirunya kebijaksanaan persemaian modern yang lalu itu perlu disadari dan dijadikan pelajaran berharga bagi para rimbawan. Keteguhan keprofesian kehutanan harus di atas kepentingan politik dan jabatan.
   Kesalahan *F.S.* oleh konsultan asing seperti diutarakan di atas serta adanya pola pinjaman dalam bentuk barang dengan sistem *"turn key project"* (dimana pembangunan dibuat oleh si pemberi pinjaman) sangatlah perlu disadari dan kemudian dijadikan bahan diplomasi tingkat pimpinan Departemen dan pimpinan negara agar ada peninjauan terhadap pembayaran hutang yang meringankan Indonesia. Namun demikian di sisi yang lain kita tetap menyadari bahwa kesalahan telah terjadi dan kita semua harus menghadapinya. Kalaupaun kita biarkan maka pengembalian pinnjaman pokok dan bunganya tetaplah membebani kita semua. Oleh karena itu kita semuanya (pemerintah, BUMN, dan swasta) harus tetap mau mengulurkan tangan untuk mengatasi masalah tersebut bersama-sama.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN PENANGANAN MASALAH

Ada dua pendekatan penanganan masalah yang mungkin dilakukan, yaitu :

1. Pendekatan pasar bebas

Kegiatan penanaman beberapa tahun ke depan (2 - 5 tahun) akan mengalami penurunan atau paling tidak terjadi stagnasi. Untuk menambah kegiatan ekonomi para investor cenderung *"wait and see"*. Namun demikian kegiatan penanaman yang ada perlu diinventarisir : HTI, perkebunan, RRL, HKM dan lain-lain, untuk setiap wilayah yang secara potensial dapat dilayani oleh unit persemaian modern yang ada di wilayah tesebut. Inventarisasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa kapasitas produksi bibit yang dibutuhkan beserta harganya yang dapat dibayarkan oleh konsumen.

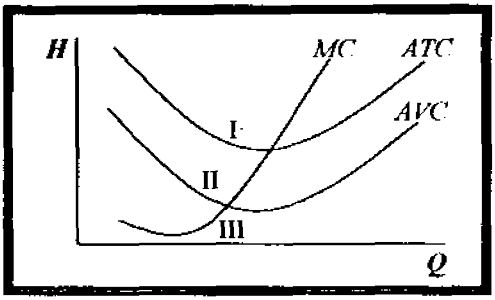

Apabila kondisi (kapasitas dan harga) berada pada :

- Posisi I : *good and go*, karena *profitable*
- Posisi II : *bad but go*, untuk menutupi biaya tetap
- Posisi III : *bad and not go*, untuk itu fasilitas dan peralatan-peralatan persemaian perlu disimpan baik-baik dan dijaga untuk sewaktu-waktu digunakan kembali.

Tampaknya dari kondisi permintaan secara wilayah tidaklah menjadi masalah namun ada keraguan akan kemampuan manajer persemaian untuk mencari dan menangkap peluang pasar, serta mengatasi permasalahan resiko yang berkaitan dengan peningkatan biaya dan kerusakan selama angkutan. Oleh karena itu pendekatan ini cenderung kurang memungkinkan.

2. ***Pendekatan pasar "kontrak pekerjaan"***

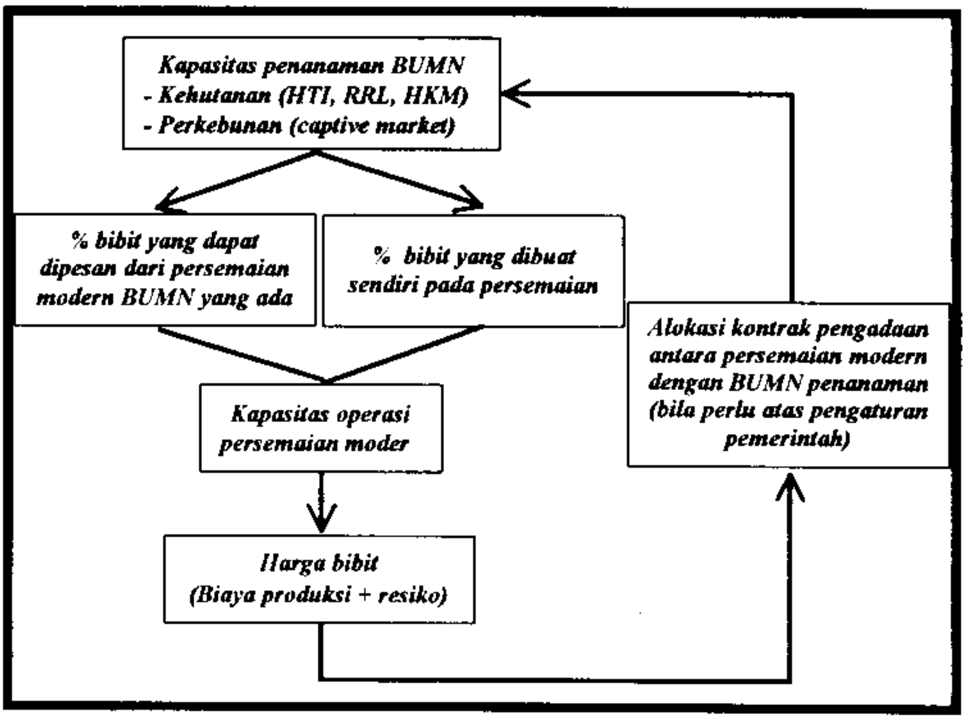

Pendekatan ini tampaknya lebih dimungkinkan karena telah ada jaminan kapasitas dan harga dari " *Captive market* " tersebut, sehingga unit persemaian modern dapat berjalan secara lebih pasti. Namun demikian masih diperlukan kebijaksanaan Pemerintah untuk memperkuat keberadaan dan keberlanjutan unit usaha persemaian modern tersebut, yakni :

a. Bagian biaya pengadaan bibit sebesar ± 10 % dialokasikan (melalui tahapan tertentu) kepada persemaian secara terpisah. Bahkan sebaiknya agar kualitas bibit meningkat, biaya yang dialokasikan perlu lebih tinggi lagi. Sebagai contoh di beberapa negara maju mencapai 30 %.

b. Unit persemaian modern yang mendapat jaminan *"Captive market"* dan alokasi dana yang terpisah dan cukup besar harus dimungkinkan untuk dapat dikelola oleh perusahaan swasta atau anak perusahaan yang mandiri dari BUMN yang ada di wilayah tersebut.

c. Pemerintah perlu membantu menciptakan (inovasi) teknologi pengangkutan bibit untuk jarak yang lebih jauh serta kondisi jalan yang kurang baik namun tetap mengakibatkan kerusakan bibit sekecil mungkin. Permasalahan jarak yang jauh serta kondisi jalan yang kurang baik berkaitan dengan wilayah penanaman yang luas namun dilayani oleh unit persemaian modern yang berada di suatu tempat dengan kapasitas yang besar.

Demikianlah butir-butir bahan pertemuan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.